SALINAN

PERATURAN DESA BIRU
NOMOR : 11 TAHUN 2016

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BIRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BIRU

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Desa Biru tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 06).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10).
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BIRU
Dan
KEPALA DESA BIRU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BIRU TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BIRU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Majalaya sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa Biru adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Biru dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa Biru adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Biru.
10. Kepala Desa Biru adalah pejabat pemerintah desa Biru yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa Biru adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Biru berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kewenangan Desa Biru adalah kewenangan yang dimiliki Desa Biru meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Biru, pelaksanaan Pembangunan Desa Biru, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Biru, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Biru berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Biru.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa Biru sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang talah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Daftar Kewenangan desa Biru yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala desa.

BAB III
KEWENANGAN DESA BIRU BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa Biru berdasarkan hak asal usul meliputi :

a. sistem organisasi masyarakat desa;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga;
d. pengelolaan tanah Desa Biru; dan
e. pengembangan peran masyarakat Desa Biru.

Pasal 4

Daftar kewenangan Desa Biru beradasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa Biru ini.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa Biru meliputi :

a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

a. individu;
b. organisasi kemasyarakatan;
c. perguruan tinggi;
d. lembaga swadaya masyarakat;
e. lembaga donor; dan
f. perusahaan.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa Biru meliputi :

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa Biru;
b. pelaksanaan pembangunan Desa Biru;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa Biru; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa Biru.

Pasal 8

Daftar kewenangan lokal berskala Desa Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Biru ini.

BAB V
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA BIRU

Pasal 9

Kewenangan Desa Biru berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Biru ditetapkan di Desa Biru dengan tahapan sebagai berikut :

a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa Biru yang telah
b. ditetapkan dalam Peraturan Desa Biru;
c. penyusunan rancangan Peraturan Desa Biru;
d. pembahasan bersama BPD;
e. penetapan Peraturan Desa Biru.

Pasal 10

(1) Pemilihan kewenangan Desa Biru sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa Biru yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa Biru, Lembaga Kemasyarakatan Desa Biru dan Unsur masyarakat.
(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. tokoh agama;
    b. tokoh masyarakat;
    c. tokoh pendidik;
    d. perwakilan kelompok tani;
    e. perwakilan kelompok perajin;
    f. perwakilan kelompok perempuan;
    g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
    h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa Biru dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(4) Pemilihan kewenangan Desa Biru didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa Biru yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
(5) Kepala Desa Biru bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Biru lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa Biru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa Biru sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

(1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6), Pemerintah Desa Biru menyusun Rancangan Peraturan Biru tentang Kewenangan Desa Biru.
(2) Rancangan Peraturan Desa Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat Majalaya.

Pasal 12

Bedasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Kepala Desa Biru menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Biru tentang Kewenangan Desa Biru kepada BPD untuk dbahas dan disepakati bersama.

Pasal 13

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Biru ditetapkan dengan Peraturan Desa Biru setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
(2) Peraturan Desa Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa Biru dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Biru, Pelaksanaan pembangunan Desa Biru, Pembinaan kemasyarakatan Desa Biru, dan pemberdayaan masyarakat Desa Biru.
(3) Peraturan Desa Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 14

Penetapan Daftar Kewenangan Desa Biru dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa Biru, sarana dan prasarana Desa Biru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa Biru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Biru ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Biru.

Ditetapkan di : Biru
Pada tanggal : 14 November 2016

Kepala Desa Biru

ASEP ZAKI KAMIL

Diundangkan di Desa Biru
Pada tanggal 14 November 2016

Sekretaris Desa Biru

AAN KURNIAWAN, S.Sy

Berita Desa Biru Nomor 11 Tahun 2016

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DESA BIRU
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BIRU

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DI DESA BIRU

NO.	BIDANG	URAIAN
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan sistem organisasi perangkat desa adat seperti Mitra Cai; b. Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa; c. pengelolaan tanah kas Desa; d. Pendataan tanah-tanah kas desa; e. Fasilitasi pensertifkatan tanah-tanah kas desa; f. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa; g. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; h. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; i. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan j. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Pelestarian budaya gotong-royong. kerja bakti, bakti sosial; b. Pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris; c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa: pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga; b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: shodaqoh, tradisi; c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelestarian adat di desa, seperti muludan, rajaban, likuran, syukuran, sya'banan, ziarah kubur; b. Pelestarian budaya islami, c. Syukuran setelah panen (perorangan); dan d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

Kepala Desa Biru

Asep Zaki Kamil

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA DESA BIRU

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BIRU

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA DI DESA BIRU

NO.	BIDANG	URAIAN
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. penetapan dan penegasan batas Desa; b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non Pertanian f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; g. pendataan penduduk berumur 17 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; i. penetapan organisasi Pemerintah Desa; j. pembentukan Badan Permusyaratan Desa k. penetapan perangkat Desa; l. penetapan Badan Usaha Milik Desa; m. penetapan APB Desa; n. penetapan peraturan Desa; o. penetapan kerja sama antar-Desa; p. pernberian izin penggunaan gedung perternuan atau balai Desa; q. pendataan potensi Desa; r. pernberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; s. penetapan Desa dalarn keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan,

		wabah penyakit, gangguan kearnanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalarn skala Desa; t. pengelolaan arsip Desa; u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa. v. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; w. Pernbentukan organisasi Pernerintah Desa; x. Penyelenggaraan/Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; y. Peningkatan kapasitas perangkat desa; z. Pembentukan BPD; aa. Penetapan Peraturan di Desa; bb. Pengelolaan Keuangan Desa; ; cc. Pengelolaan Aset Desa; dd. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa; ee. Penyelenggaraan Kerjasarna antar desa dan atau dengan pihak ketiga; ff. Pengelolaan sistem informasi desa; gg. Pemberian Rekomendasi/ penunjukan; hh. Pengembangan hasil-hasil industri Desa; ii. Pendataan kependudukan desa; jj. Pengadaan sarana dan prasarana kearnanan desa (Pos kamling/gardu) kk. Pemeliharaan ketentrarnan dan ketertiban masyarakat desa; ll. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa; mm. Pembiayaan perlindungan masyarakat (nomenklatur berubah) nn. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa; oo. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa pp. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM); qq. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; rr. Penyusunan profil desa ss. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendata Penduduk Miskin tt. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; uu. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa; vv. Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;

		ww. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan xx. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. pelayanan dasar Desa; 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik desa; 2) pengembangan tenaga kesehatan Desa; 3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: a) layanan gizi untuk balita; b) pemeriksaan ibu hamil; c) pemberian makanan tambahan; d) penyuluhan kesehatan; e) gerakan hidup bersih dan sehat; f) penimbangan bayi; dan g) gerakan sehat untuk lanjut usia. 4)pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5)pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; 6)penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular; 7)pengelolaan dana sehat; 8)pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 9)pengadaan sarana kesehatan tingkat desa; 10) penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 11) pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa 12) fasilitasi Penyengggaraan Desa Siaga 13) pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs 14) pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin 15) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; 16) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan

		Desa; 17) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelornpok belajar di Desa. 18) fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal; 19) fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 20) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat; 21) fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa 22) pendataan pendidikan di desa; 23) bantuan Siswa Miskin; 24) fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa; 25) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 26) menerbitkan surat keterangan miskin; 27) fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; 28) pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; 29) fasilitasi pemberian bantuan social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 30) penanggulangan kemiskinan tingkat desa; 31) penetapan penduduk miskin; b. Sarana dan prasarana Desa 1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 4) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; 5) pembangunan energi baru dan terbarukan; 6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 7) pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; 8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 9) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 11) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 12) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 13) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;

		14) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. 15) fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah; 16) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 17) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal; 18) pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa; 19) pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan 20) Drainase Desa; 21) penanggulangan bencana tingkat desa c. Pengembangan ekonomi lokal Desa; 1) pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 2) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 3) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 4) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 5) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 6) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 7) pengembangan benih lokal; 8) pengembangan temak secara kolektif; 9) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 10) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 11) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 12) pengelolaan balai benih ikan; 13) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;dan 14) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. 15) fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil 16) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif 17) fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil); 18) penguatan kapasitas kelompok UMK; 19) pengembangan Kelembagaaan Petani lokal 20) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;

		21) pemasyarakatan pupuk organik; 22) pengembangan lumbung pangan; 23) fasilitasi modal usaha tani; 24) fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul; 25) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa; 26) pelestarian kebun bibit desa; 27) pengelolaan turus jalan desa; d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa. 1) penghijauan; 2) pembuatan terasering; 3) perlindungan mata air; 4) pembersihan daerah aliran sungai; 5) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa; 6) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; 7) pengelolaan persampahan di tingkat desa; 8) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa; 9) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan 10) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; b. membina kerukunan warga masyarakat Desa; c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; e. pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana; f. pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana; g. pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga; h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana; i. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; k. pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa; l. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;

		m. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan n. penyelenggaraan olahraga tingkat desa.
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. pengembangan seni budaya lokal; b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 1) kelompok tani; 2) kelompok seni budaya; dan 3) kelompok rnasyarakat lain di Desa. d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel; f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; k. pendayagunaan teknologi tepat guna; l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2) kelompok usaha ekonomi produktif; 3) kelompok perempuan; 4) kelompok tani; 5) kelompok masyarakat miskin; 6) kelompok pengrajin; 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8) kelompok pemuda; dan · 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa. m. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa; n. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;

		o. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat; p. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa; q. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan; r. pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa; s. pemberdayaan masyarakat berbasis gender; t. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa; u. pelaksanaan pengarusutamaan gender; v. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Kepala Desa Biru

ttd

Asep Zaki Kamil

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN MAJALAYA

DESA BIRU

Alamat : Jalan Cangkuang No. 02 Telp. (022) 70094425 Majalaya

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

TENTANG

HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BIRU

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas Bulan November tahun 2016 bertempat di Balai Desa Biru telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung yang dapat laksanakan di Desa Biru, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Desa Biru dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, adalah sebagai berikut :

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BIRU KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :

a. sistem organisasi perangkat Desa;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pengelolaan tanah kas Desa;
d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
e. pengelolaan tanah titisara; dan
f. pengembangan peran masyarakat Desa.

B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

a. bidang pemerintahan Desa,

b. pembangunan Desa;

c. kemasyarakatan Desa; dan

d. pemberdayaan masyarakat Desa.

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa Biru dan BPD terhadap kesiapan desa Biru dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten Bandung yang pengaturannya diserahkan kepada Desa Biru kecamatan Malajaya dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa Biru, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Biru , 14 November 2016

KETUA BPD BIRU | KEPALA DESA BIRU

Ir. Cecep A. Saepudin | Asep Zaki Kamil

DAFTAR HADIR PESERTA

No.	Nama	Unsur	Tandatangan

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN MAJALAYA

DESA BIRU

Alamat : Jalan Cangkuang No. 02 Telp. (022) 70094425 Majalaya

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BIRU

DAN

KEPALA DESA BIRU

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DESA BIRU

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini, ... tanggal ..... Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di balai Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Biru dalam rangka membahas:

Rancangan Peraturan Desa Biru Nomor ..... Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Hasil rapat diperoleh pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Biru Nomor ..... Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Biru (BPD) menyetujui rancangan Peraturan Desa Biru Nomor .... Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua	
Badan Permusyawaratan Desa	Kepala Desa
Ir. Cecep A. Saepudin	Asep Zaki Kamil